

## KATA PENGANTAR

---

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Karunianya, sehingga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021, merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggungjawaban Publik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun Tahun 2021, menggunakan kriteria pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan dalam tata cara pengisian formulir LAKIP dan stimulasi dari Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun serta bukti hasil Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah dan pembangunan yang Akuntabel menuju pencapai good governance

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan LKJ dimasa yang akan datang, semoga LKJ ini benar-benar menjadi salah satu bukti tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2022  
Kepala DPPKB  
Kabupaten Sarolangun



**LINDA NOVITA HIRAWATY, SH., MH**

PEMBINA TK. I

NIP. 19791121 200312 2003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	6
BAB II PERENCANAAN KERJA	
2.1. Perjanjian Kinerja SKPD	16
2.2. Indikator Kinerja Utama	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021	18
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	27
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	27
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	28
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.1.6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja	35
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Amanat Penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen perencanaan Strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara Teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun nomor 32 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka di susunlah Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

Untuk mendukung Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Program Keluarga Berencana, Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pengendalian Penduduk serta Program Penyuluhan dan Penggerakan yang merupakan dasar yang penting dalam mencapai kualitas masyarakat. Pembangunan Keluarga berencana lebih diarahkan untuk peningkatan

Kualitas masyarakat yang berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM). Masih tinggi dan bervariasinya unmet need jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak ingin menyingkinkan anak lagi tapi tidak ber-KB ( unmet need sekitar 13,98 persen tahun 2020, di kabupaten Sarolangun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 11,55 persen, dan angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan unmet need Provinsi Jambi sebesar 13,1 %.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten sarolangun Tahun 2021, disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama periode 2021, dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntunan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaran

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Tahun 2017-2022.

### **1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD**

Dengan diterbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10; dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **1.3.1. Tugas Pokok**

Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana serta tugas pembantuan.

### 1.3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyuluhan Penggerakan dan Pengendalian Penduduk
- d. Bidang Keluarga Berencana
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- f. Kelompok Jabatan dan Fungsional

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tersebut diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

#### 1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Tugas :

Menyelenggarakan sebagian urusan penyusunan perencanaan dan kebijakan dan rumah tangga daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Memberikan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Memberikan pembinaan melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan komponen dan Instansi teknis terkait dalam melaksanakan program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Melakukan upaya-upaya penyelesaian, masalah hukum, yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **2. Tugas dan Fungsi Sekretaris**

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan mengkoordinir bidang-bidang dan pengawasan serta melaksanakan tugas umum, kepegawaian, keuangan dan aset, rumah tangga dan keprotokolan maupun pelayanan administrasi dalam lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi serta menyusun rencana dan program kerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. Menghimpun, mengolah, dan menyimpan laporan hasil setiap bidang;
- c. Menyusun bahan dan tata dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasi bahan dan tata dalam rangka penatausahaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Aset; Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang-bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan Program;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Tugas dan Fungsi Bidang Penyuluhan Penggerakan dan Pengendalian Penduduk**

Tugas :

Bidang Penyuluhan Penggerakan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan Penggerakan dan Pengendalian Penduduk.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan, KIE, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan, penggerakan, pemetaan, pengendalian Penduduk, pendayagunaan PKB/PLKB, IMP, data dan Informasi dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana;

- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, KIE, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan, penggerakan, pemetaan, pengendalian penduduk, pendayagunaan PKB/PLKB, IMP, data dan informasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat Kabupaten/Kota dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, KIE, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan, penggerakan, pemetaan, pengendalian penduduk, pendayagunaan PKB/PLKB, IMP di bidang penyuluhan, penggerakan dan pengendalian penduduk;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang penyuluhan, penggerakan dan pengendalian penduduk;
- g. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan dan parameter pengendalian penduduk;
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;

#### **4. Tugas dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana**

##### Tugas

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Sarolangun;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kerjasama;
- f. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Sarolangun;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Sarolangun;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
- j. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

#### **5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Tugas :

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. Pelaksanaan NSPK dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- d. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bin Keluarga Lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan Evaluasi dibidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Kesejahteraan dan ketahanan Keluarga
- i. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

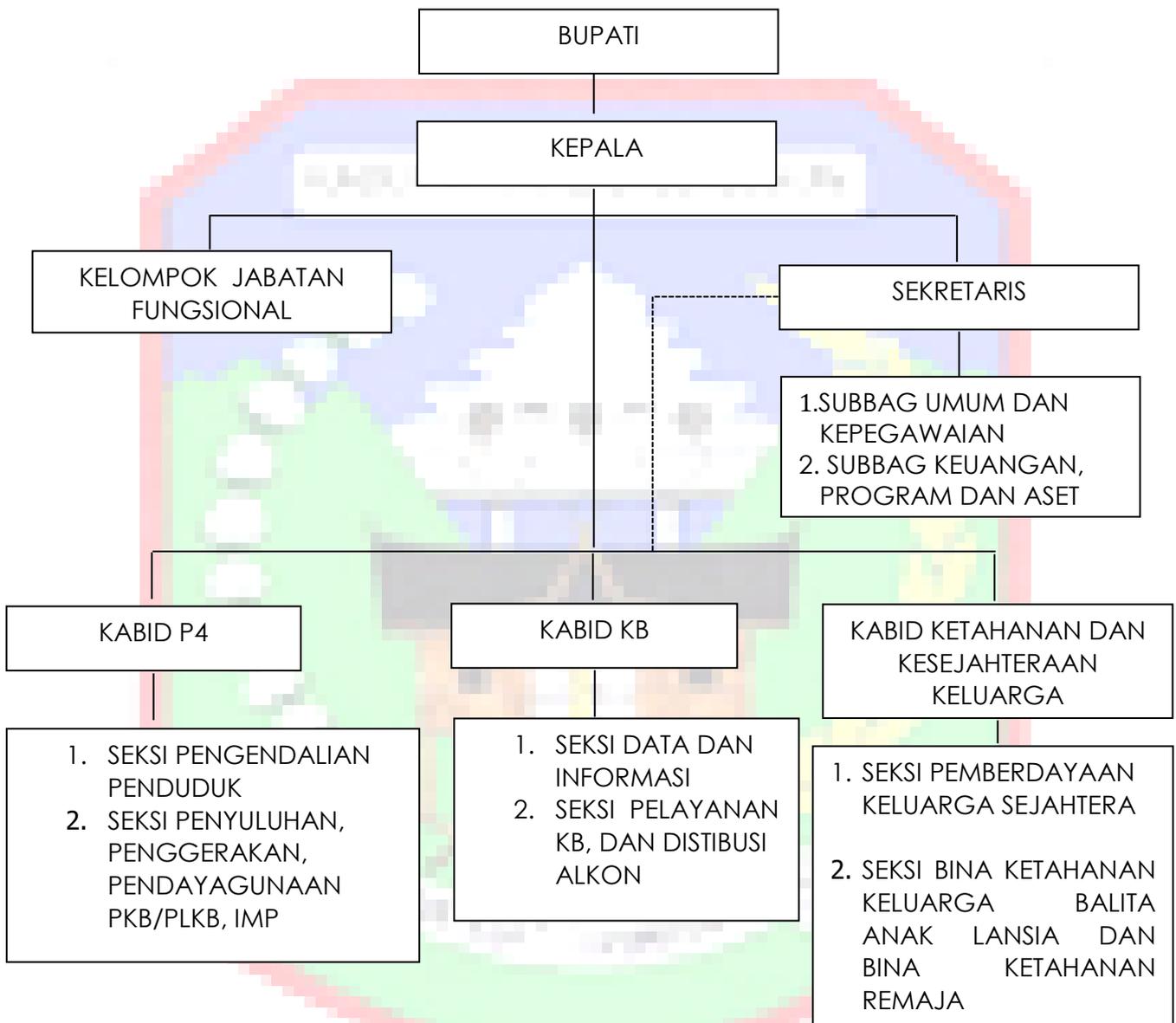
### **1.3.3. Struktur Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sarolangun di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi :

1. Sekretariat, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Aset;
2. Bidang Penyuluhan Penggerakan dan Pengendalian Penduduk yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk
  - b. Seksi Penyuluhan, Penggerakan, Pendayagunaan PKB/PLKB, IMP;
3. Bidang Keluarga Berencana yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Pelayanan KB, dan Distribusi ALKON;

4. Bidang Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Lansia dan Bina Ketahanan Remaja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam masing-masing susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing
  - b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

## STRUKTUR DPPKB KABUPATEN SAROLANGUN



## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 32 Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud nyata Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga terwujud.

Kerangka Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Periode 2017-2022 mengacu pada rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, guna mewujudkan Visi " **Sarolangun Lebih Maju dan Sejahtera**".

**Tabel. I.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %
		Total Fertility Rate	2,51

## 2.1. Perjanjian Kinerja 2021

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 2017 – 2022

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021. Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana table berikut :

**Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indikator Kinerja Utama		
		1   Contraceptive Prevalence Rate	%	70
		2   Total Fertility Rate		2,51
		Indikator Kinerja Penunjang		
		1   Persentase Kesejahteraan dan Pendapatan Keluarga Yang Meningkat	%	95
		2   Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	%	100
		3   Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	%	10
		4   Nilai SAKIP	%	B

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2017-2022, Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

**Tabel. 3. Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta Program KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
			Total Fertility Rate	$5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR } i$

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 hasil Reviu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala DPPKB Kabupaten Sarolangun Nomor 476/01/DPPKB/2021 tanggal 04 Januari 2021.

## BAB. III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dnas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun yang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stockholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaian dapat mengindikasikan keberhasilan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian IKU pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### 3.1.2. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja Utama, sasaran strategis dan Target yang dicapai.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing - masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

1. Skala Pengukuran Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

NO	Capaian Kinerja	Interprestas
1	> 100%	Tercapai Melebihi Target
2	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Tercapai

2. Skala Pengukuran Total Fertility Rate

NO	Capaian Kinerja	Interprestas
1	< 100%	Tercapai Melebihi Target
2	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3	> 100%	Tidak Tercapai

**Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Contraceptive prevalence Rate (CPR)	%	70	84,28	121
		Total Fertility Rate (TFR)		2,51	2,39	95,2

**3.1.1.1. Contraceptive prevalence Rate (CPR)**

Indikator Contraceptive prevalence Rate (CPR) adalah Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (PA/PUS) dari target sebesar **70 %** dan terealisasi sebesar **84,24 %**, Ketercapaian melebihi dari target yaitu adanya partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dan berdasarkan jumlah pasangan usia subur sebanyak **50.692** orang terdapat jumlah peserta KB Aktif sebanyak **42.727** orang atau sebesar **84,28 %**.

Contraceptive prevalence Rate (CPR) merupakan ukuran kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi dan CPR dapat membantu penurunan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

### 3.1.1.2. Total Fertility Rate (TFR)

Indikator Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita Usia Subur (WUS) selama masa reproduksinya, dari target 2,51 dan terealisasi sebesar 2,39, untuk Kabupaten Sarolangun telah mencapai target yang diharapkan. Dari jumlah Wanita Usia Subur (WUS) menurut kelompok Umur 15 – 49 Tahun pada Tahun 2021 sebanyak 73.157 orang dan jumlah kelahiran menurut umur Ibu 15 – 49 Tahun pada tahun 2021 sebanyak 5.160 Orang.

**Tabel. 5. Formulasi IKU**

NO	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Capaian
1	Contraceptive prevalence Rate (CPR)	$\frac{42.727}{50.692} \times 100\% = 84,28\%$	Tercapai Target
	Total Fertility Rate (TFR)	$5(0,020+0,123+0,170+0,102+0,054+0,010+0,000) = 2,395$	Tercapai Target

**Tabel. 6. DATA REALISASI TARGET PER JENIS ALAT KONTRASEPSI KB AKTIF**

<b>KONTRASEPSI</b>	<b>SASARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
IUD	1.200	2.727	227.2
MOW	959	698	72.78
MOP	105	29	27.6
KONDOM	1.110	1.146	103.2
IMPLANT	5.534	7.974	144
SUNTIK	21.100	22.772	107.9
PIL	10.650	7.381	69.3

**Tabel. 7. Total Peserta KB Aktif dibanding PUS Tahun 2020**

No	KECAMATAN	PUS	JENIS KONTRASEPSI							JUMLAH	PA/PUS (%)
			MOW	MOP	IUD	IMP	STK	PIL	KDM		
1	Batang Asai	3.069	2	1	8	99	806	221	11	1.148	37,40
2	Limun	3.314	63	0	15	369	1.770	750	25	2.992	90,28
3	Sarolangun	9.832	216	1	2.016	735	5.108	1.183	431	9.690	98,55
4	Pauh	3.937	53	2	7	343	2.718	602	39	3.764	95,60
5	Pelawan	5.463	81	10	105	1.350	2.093	1.176	282	5.097	93,30
6	Mandiingin	7.184	120	4	120	859	3.237	1.096	135	5.571	77,54
7	Air Hitam	4.440	49	7	198	2.189	987	457	63	3.950	88,96
8	Bathin VIII	3.637	14	1	43	281	1.975	783	41	3.138	86,28
9	Singkut	7.511	81	3	201	1.578	3.183	853	95	5.994	79,80
10	Cermin Nan Gedang	2.305	19	0	14	171	895	260	24	1.383	60,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.692</b>	<b>698</b>	<b>29</b>	<b>2.727</b>	<b>7.974</b>	<b>22.772</b>	<b>7.381</b>	<b>1.146</b>	<b>42.727</b>	<b>84,28</b>

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT KELOMPOK UMUR IBU 2021									
NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR/USIA							KET
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MANDI ANGIN	34	178	218	179	82	22	1	714
2	PELAWAN	21	145	205	118	64	10	0	563
3	PAUH	27	109	134	69	37	8	0	384
4	LIMUN	12	101	119	69	43	1	0	345
5	BATANG ASAI	35	120	107	67	39	10	0	378
6	SAROLANGUN	31	251	362	252	134	9	2	1041
7	CNG	10	55	78	52	33	8	0	236
8	SINGKUT	29	198	268	156	85	12	0	748
9	AIR HITAM	13	94	159	90	52	10	0	418
10	BATIN VIII	15	85	103	77	47	8	0	335
<b>JUMLAH</b>		<b>227</b>	<b>1336</b>	<b>1753</b>	<b>1129</b>	<b>616</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>5160</b>

JUMLAH WUS MENURUT KELOMPOK UMUR 2021									
NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR/USIA						KET	
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MANDI ANGIN	1605	1436	1330	1591	1669	1384	1189	10204
2	PELAWAN	1291	1209	1079	1230	1255	1092	876	8032
3	PAUH	923	850	782	836	819	768	597	5575
4	LIMUN	805	797	710	703	722	605	438	4780
5	BATANG ASAI	811	728	703	641	542	559	414	4398
6	SAROLANGUN	2199	2203	2216	2203	2365	2032	1656	14874
7	CNG	564	579	535	464	482	416	368	3408
8	SINGKUT	1686	1640	1416	1616	1681	1563	1273	10875
9	AIR HITAM	925	875	874	951	973	824	619	6041
10	BATIN VIII	765	547	662	812	845	707	632	4970
<b>JUMLAH</b>		<b>11574</b>	<b>10864</b>	<b>10307</b>	<b>11047</b>	<b>11353</b>	<b>9950</b>	<b>8062</b>	<b>73157</b>

ASFR DAN TFR									
NO	KECAMATAN	ASFR						TFR	
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MANDI ANGIN	0,021	0,124	0,164	0,113	0,049	0,016	0,001	<b>2,437</b>
2	PELAWAN	0,016	0,120	0,190	0,096	0,051	0,009	0,000	<b>2,411</b>
3	PAUH	0,029	0,128	0,171	0,083	0,045	0,010	0,000	<b>2,335</b>
4	LIMUN	0,015	0,127	0,168	0,098	0,060	0,002	0,000	<b>2,343</b>
5	BATANG ASAI	0,043	0,165	0,152	0,105	0,072	0,018	0,000	<b>2,773</b>
6	SAROLANGUN	0,014	0,114	0,163	0,114	0,057	0,004	0,001	<b>2,340</b>
7	CNG	0,018	0,095	0,146	0,112	0,068	0,019	0,000	<b>2,291</b>
8	SINGKUT	0,017	0,121	0,189	0,097	0,051	0,008	0,000	<b>2,410</b>
9	AIR HITAM	0,014	0,107	0,182	0,095	0,053	0,012	0,000	<b>2,318</b>
10	BATIN VIII	0,020	0,155	0,156	0,095	0,056	0,011	0,000	<b>2,462</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>0,020</b>	<b>0,123</b>	<b>0,170</b>	<b>0,102</b>	<b>0,054</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>	<b>2,395</b>

### 3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel. 8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			CAPAIN KINERJA
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9/6)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Contraceptive prevalence Rate (CPR)	69.50	51.90	74.68	70	84,28	121	162,02
		Total Fertility Rate (TFR)	2,71	-	-	2,51	2,39	95,2	95,2

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel. 9. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA					DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Contraceptive prevalence Rate (CPR)	72.72	72.88	51.90	84,28	-	68	69	69.5	70	70.5
		Total Fertility Rate (TFR)	-	-	-	2,39	-	-	-	2,71	2,51	2,50

### **3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

#### **3.1.4.1. Contraceptive prevalence Rate (CPR)**

Tingginya capaian mCPR menurut data PK Update desember 2021 dikarenakan beberapa faktor antara lain data PUS dan PA tidak diupdate oleh para kader (PPKBD/Sub PPKBD) dikarenakan kurangnya pembinaan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target mCPR tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB yang memenuhi kompetensi sesuai standar yang ditetapkan hanya sebesar 75%;
2. Masih banyaknya PKB/PLKB yang tidak memiliki data peserta KB Ulangan;
3. Pengelola program Bangga Kencana belum sepenuhnya memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dalam melakukan intervensi program di lapangan;
4. Masih tingginya tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi;
5. Menurunnya jumlah frekuensi pelayanan KB bergerak dikarenakan adanya Pandemi Covid-19;
6. Masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana pelayanan KB (obgyn bed, IUD kit, Implan kit);
7. Adanya keyakinan dan budaya tertentu sehingga PUS tidak menggunakan alat kontrasepsi modern;
8. Adanya budaya patrilineal dimana suami memegang keputusan mutlak dalam hal penggunaan kontrasepsi tanpa berkompromi dengan pasangannya sehingga tidak ber KB.

Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya dan alternative solution untuk meningkatkan mCPR yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi Pasangan Usia Subur di 26 fasilitas kesehatan yang ditetapkan sebagai salah satu output prioritas yang mendukung proyek prioritas nasional 2021;
2. Perencanaan kebutuhan alokon mempertimbangkan 4 (empat) metode kuantifikasi yaitu melalui data demografi, target berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat, data konsumsi, dan data pelayanan;
3. Distribusi dinamis dilakukan untuk mencukupi kebutuhan alkon antar Desa dan serta memanfaatkan stok cadangan (buffer) di Kabupaten;
4. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui berbagai media baik above the line, through the line serta fokus pada strategi below the line dan melalui tenaga lini lapangan berbasis data dan informasi pencapaian program serta melibatkan stakeholder, mitra kerja untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kontrasepsi modern;
5. Penguatan kinerja PKB PNS dan PLKB non PNS, serta revitalisasi kader IMP untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat dengan penekanan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan;
6. Mendayagunakan peran motivator KB Pria serta mitra kerja dalam memberikan sosialisasi mengenai KB Pria;
7. Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di poktan/komunitas;
8. Meningkatkan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;

#### 3.1.4.2 Total Fertility Rate (TFR)

Capain TFR yang telah menjadi target dikarenakan berbagai faktor yang mendukung serta mensukseskan program pada pengendalian Penduduk.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target TFR tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Budaya yang masih memiliki pandangan terhadap nilai anak (value of children) dan masih adanya masyarakat yang percaya atas pandangan “banyak anak, banyak rezeki”;
2. Faktor SDM, dimana masih kurangnya tenaga PKB/PLKB jika dibandingkan dengan wilayah binaan;
3. Peserta KB baru didominasi oleh PUS yang bukan Muda Usia Paritas Rendah (MUPAR)

Sedangkan upaya dan alternative solution untuk meningkatkan TFR yaitu sebagai berikut:

1. Promosi pendewasaan Usia Kawin pertama dan Kesehatan Reproduksi remaja melalui Program Generasi Berencana (GenRe)
2. Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan fasilitas kesehatan yang melayani KB
3. Pelayanan KB Sejuta Akseptor
4. Pembinaan pelayanan ulangan berdasarkan data by Name, Address and Phone (NAP) dan Sahabat PLKB dalam rangka meningkatkan CPR
5. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam program Bangga Bencana melalui fasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kabupaten/ Kota sehingga indikator program Bangga Kencana (termasuk LPP dan TFR) tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstrada dan RKPD) pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun

6. Promosi dan KIE tentang isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, melalui berbagai media dan tenaga lini lapangan dan melibatkan stakeholder dan mitra kerja;
7. Advokasi kepada lintas sektor tingkat Kecamatan dan Desa terkait program Bangga Kencana, dan kegiatan kemitraan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, TNI;
8. Pemanfaatan data mikro pendataan keluarga untuk pemetaan PUS dalam intervensi program oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD melalui kegiatan Surveilans Pasca Pelayanan untuk menjaga kesertaan PA dan memperoleh PB;
9. Penguatan Kampung KB sebagai lokus penggarapan program Bangga Kencana;

### **3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Program Keluarga Berencana dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.728.499.096,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.712.956.549,00,- atau sebesar 72,76%, dan dibandingkan dengan capaian Kinerja CFR dengan sasaran target sebesar 70 % dan terealisasi sebesar 84,28 % maka terjadi ke efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran kinerja tersebut.
2. Program Pengendalian Penduduk Dengan jumlah dana sebesar Rp. 79.615.418,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.450.880,00,- atau sebesar 65,88%, dibandingkan dengan capaian Kinerja TFR dengan sasaran target sebesar 2,51 70 % dan terealisasi sebesar 2,39 % maka terjadi ke efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran kinerja tersebut.

NO	Eselon	Jml Kebutuhan	Jml Yang Ada	Jenis Jabatan	Pendidikan/ Kompetensi yang di butuhkan	Yang ada saat ini	Analisis jabatan	Analisis kebutuhan
	IIB	1	1	Kepala Dinas	S1 /S2 kesehatan masyarakat	S2 Hukum	Telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang di butuhkan untuk jabatan yang di maksud	Telah terpenuhi
	IIIA	1	1	Sektaris Dinas	S1 semua jurusan,	S1 Pertanian	Telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang di butuhkan	Telah terpenuhi
	IIIB	3	3	Kepala Bidang Penyuluhan pergerakan dan pengendalian penduduk	S1 Semua jurusan	S1 Ekonomi	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan kependudukan
				Kepala bidang Keluarga Berencana	S1 Semua Jurusan	S1 Ekonomi	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan kependudukan
				Kepala Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	S1 Semua Jurusan	S1 Pendidikan	Telah sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.	Telah terpenuhi Perlu di lengkapi dengan beberapa diklat yang terkait dengan kependudukan
	Iva	8	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Minimal D3 Semua Jurusan	SMU	Belum sesuai Kualifikasi namun telah sesuai dengan kompetensi karena telah	Peningkatan pendidikan berkelanjutan perlu di pertimbangkan, memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan

						berpengalaman lebih dari 4 tahun pada jabatan fungsional yang setingkat		
				Kasubag Keuangan, Aset dan Program	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 Pendidikan	Telah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang setingkat	Telah sesuai
				Kasi Pengendalian Penduduk	Minimal D3 Semua Jurusan	D3 Keperawatan	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Penyuluhan, Penggerakan, pendayagunaan PLKB/PKB, IMP	Minimal D3 Semua Jurusan	SMU	Tidak sesuai dengan kualifikasi namun telah sesuai dengan kompetensi karena telah memiliki pengalaman sebagai penyuluh lapangan KB	Perlu pemberian kesempatan peningkatan jenjang pendidikan agar terpenuhi kualifikasi sebagai kepala seksi
				Kasi Data dan Informasi	Minimal D3 Semua Jurusan	S1 Kesehatan Masyarakat	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Pelayanan KB dan Distribusi Alkon	Minimal D3 Semua Jurusan	D3 Kebidanan	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Minimal D3 Semua Jurusan	S2 scientist	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi	Telah sesuai
				Kasi Bina Ketahanan	Minimal D3	S1	Telah sesuai kualifikasi dan	Telah sesuai

				Keluarga, Balita, Anak, lansia dan Bina Ketahanan Remaja	Semua Jurusan	Kesehatan Masyarakat	Kompetensi	
JFU/Honor	40	17	Analisis, Pelaksana	Minimal SMU	SMU, D3 dan S1	Jabatan Analisis dan Pelaksana masih banyak yang tidak ada. Jumlah SDM sangat terbatas	Masih di butuhkan terdapat kekurangan tenaga. Telah mengajukan Nota Dinas untuk Penambahan jumlah tenaga analisis dan pelaksana	
Tenaga Fungsional/Honor	75	80	PKB / PLKB	Minimal SMU	SMU, D3 dan S1	Telah sesuai kualifikasi dan Kompetensi dan masih kurangnya tenaga penyuluh	Masih di butuhkan terdapat kekurangan tenaga dan penempatan petugs yang belum merata	

### 3.1.6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Berdasarkan Alokasi Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam Tabel Berikut :

**Tabel 10. Rincian Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.663.618.663,00</b>	<b>5.299.252.021,00</b>	79,53%
- Belanja Pegawai	2.892.341.723,00	2.735.946.636,00	94,59%
- Belanja Barang dan Jasa	3.771.276.940,00	2.563.305.385,00	67,97%
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.245.365.000,00</b>	<b>1.207.539.000,00</b>	96,96%

Sumber : LRA Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) T.A. 2021

Dari target anggaran keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2021 realisasi penggunaan anggaran tidak tercapai sebagaimana tercantum di dalam DPA 2021. Hal ini di sebabkan Pergeseran Anggaran, relokasi atau refocusing dana APDD 2021 untuk penanganan dan pencegahan covid-19.

Realisasi Dana dan Program yang mendukung dan penunjang untuk mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** , indikator utamanya adalah :

1. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
  - 1.1. Program Keluarga Berencana

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 3.728.499.096,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. **2.712.956.549,00,-** atau sebesar **72,76%** dengan rincian kegiatan :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebesar Rp. 897.193.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 346.094.900,- atau sebesar 38,58%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%,
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebesar Rp. 758.400.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 758.400.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%,
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.764.186.032,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 1.434.069.585,- atau sebesar 81,29%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%,
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebesar Rp. 45.744.032,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 36.480.585,- atau sebesar 79,75%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%,

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana perbandingan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 81,46% mengalami penurunan sebesar 08,70%.

## 2. Total Fertility Rate (TFR)

### 2.1. Program Pengendalian Penduduk

Dengan jumlah dana sebesar Rp. **79.615.418,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. **52.450.880,00,-** atau sebesar **65,88%** dengan rincian kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sebesar Rp. 45.000.792,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 43.413.622,- atau sebesar 96,47%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%,
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 34.614.626,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 9.037.258,- atau sebesar 26,11%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%,

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana perbandingan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 99,82%, mengalami penurunan sebesar 33,94%.

## KEGIATAN PELAYANAN KB





## KEGIATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYULUHAN



Juara I se Provinsi Jambi Kampung KB Percontohan





## KEGIATAN KELUARGA SEJAHTERA





### 3.2. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 4 (empat) Program 13 (tiga belas) Kegiatan 37 (Tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang terdiri dari, 5 (lima) Kegiatan 15 (lima belas) Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2 (dua) Kegiatan 7 (tujuh) Sub Kegiatan Program Pengendalian Penduduk, 4 (empat) Kegiatan 11 (sebelas) Sub Kegiatan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan 2 (dua) Kegiatan 4 (empat) Sub Kegiatan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (P2KS) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, guna mewujudkan Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas untuk mencapai terwujudnya Sarolangun Lebih Sejahtera, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 7.908.983.663,00,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) terealisasi sebesar Rp. 6.506.791.021,00,- (Enam milyar lima ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) atau sebesar 82,27 %. adapun rincian belanja dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.663.618.663,00</b>	<b>5.299.252.021,00</b>	79,53%
- Belanja Pegawai	2.892.341.723,00	2.735.946.636,00	94,59%
- Belanja Barang dan Jasa	3.771.276.940,00	2.563.305.385,00	67,97%
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.245.365.000,00</b>	<b>1.207.539.000,00</b>	96,96%

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
				Rp	Outcome/Output/ Sub.output	Rp	Outcome/Output/ Sub.output	(%)			
	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>DPPKB</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>7.908.983.663</b>		<b>6.506.791.021</b>		<b>82,27%</b>			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	912.527.426	5 dan 15 Keg. Dan Sub.Keg	850.170.166	5 dan 15 Keg. Dan Sub.Keg	93,17%			
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>12.506.084</i>	<i>2 Sub.Kegiatan</i>	<i>7.636.084</i>	<i>2 Sub.Kegiatan</i>	<i>61,06%</i>			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.056.084	9 Dokumen	3.056.084	9 Dokumen	100%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.450.000	9 Dokumen	4.580.000	9 Dokumen	48,47%			
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>15.393.293</i>	<i>2 Sub.Kegiatan</i>	<i>12.828.593</i>	<i>2 Sub.Kegiatan</i>	<i>83,34%</i>			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.892.341.723	29 Orang/1.T.A.	2.735.946.636	29 Orang/1.T.A.	94,59%			
			<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2.169.766.667</i>	<i>29 Orang/1.T.A.</i>	<i>2.018.683.549</i>	<i>29 Orang/1.T.A.</i>	<i>93,04%</i>			
			<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>602.935.056</i>	<i>29 Orang/1.T.A.</i>	<i>602.123.087</i>	<i>29 Orang/1.T.A.</i>	<i>99,87%</i>			
			<i>Belanja Pegawai /Belanja Honorarium</i>	<i>119.640.000</i>	<i>19 Orang/1..T.A.</i>	<i>115.140.000</i>	<i>19 Orang/1..T.A.</i>	<i>96,24%</i>			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			-					
			Belanja Honorarium	119.640.000	19 Orang/1..T.A.	115.140.000	19 Orang/1..T.A.	96,24%			
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	119.640.000		115.140.000		96,24%			

		Keuangan		19	Orang/1..T A.		19	Orang/1..TA.			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.670.000	4	Dok./12 Bulan	3.330.000	4	Dok./12 Bulan	58,73%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.723.293	14	Dokumen/ 12 Bulan	9.498.593	14	Dokumen/12 Bulan	<b>97,69%</b>		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>120.786.489</b>	<b>4</b>	<b>Sub.Kegi atan</b>	<b>102.355.288</b>	<b>4</b>	<b>Sub.Kegiata n</b>	<b>84,74%</b>		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.471	72	Jenis/12 Bln	1.997.471	72	Jenis/12 Bln	100%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.320.618	2.8 09	Jenis/12 Bln	49.010.712	2.8 07	Jenis/12 Bln	97,40%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.278.400	10 00	Jenis/12 Bulan	7.278.400	10 00	Jenis/12 Bulan	100%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.190.000	15 3	Kali/Tahun	44.068.705	11 0	Kali/Tahun	72,02%		
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>643.661.560</b>	<b>3</b>	<b>Sub.Kegi atan</b>	<b>630.926.601</b>	<b>3</b>	<b>Sub.Kegiata n</b>	<b>98,02%</b>		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.1 15	Lembar	1.000.000	1.1 15	Lembar	90,91%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.561.560	1	T.A.	48.926.601	1	T.A.	82,14%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.000.000	51	Orang/12. Bulan	581.000.000	51	Orang/12.Bul an	100%		
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	517.000.000	47	Orang/11. Bulan	516.000.000	46	Orang/11.Bul an	100%		
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.000.000	3	Orang/11 Bulan	33.000.000	3	Orang/11 Bulan	100%		
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.000.000	1	Orang/11 Bulan	11.000.000	1	Orang/11 Bulan	100%		
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum [-] Pelayan Kantor	11.000.000	1	Orang/11 Bulan	10.000.000	1	Orang/11 Bulan	90,91%		
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan [-] Penjaga Malam Kantor	11.000.000	1	Orang/11 Bulan	11.000.000	1	Orang/11 Bulan	100%		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.180.000</b>	<b>2</b>	<b>Sub.Kegi atan</b>	<b>96.423.600</b>	<b>2</b>	<b>Sub.Kegiata n</b>	<b>80,23%</b>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.840.000	5 da n	Unit.Rd.4/ Rd.2	91.573.600	5	Unit.Rd.4/Rd .2	80,44%		

				75						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.340.000	10	Unit/12 Bulan	4.850.000	4	Unit/12 Bulan	76,50%	
		<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>79.615.418</b>	<b>2</b>	<b>Keg./ Sub.Keg</b>	<b>52.450.880</b>	<b>2</b>	<b>Keg./ Sub.Keg</b>	<b>65,88%</b>	
		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>45.000.792</b>	<b>3</b>	<b>Sub.Kegiatan</b>	<b>43.413.622</b>	<b>2</b>	<b>Sub.Kegiatan</b>	<b>96,47%</b>	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.190	1	Dokumen	24.515.038	1	Dokumen	98,06%	
		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.602	40	Orang/1.TA	18.898.584	40	Orang/1.TA	94,49%	
		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.614.626</b>	<b>4</b>	<b>Sub.Kegiatan</b>	<b>9.037.258</b>	<b>1</b>	<b>Sub.Kegiatan</b>	<b>26,11%</b>	
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	22.517.258	30	Orang/1.TA	9.037.258	30	Orang/1.TA	40,13%	
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	-	-	-	-	-	-	-	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12.097.368	1	Dokumen	-	-	Dokumen	0,00%	
		<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>3.728.499.096</b>	<b>4</b>	<b>Keg/Sub. Keg</b>	<b>2.712.956.549</b>	<b>4</b>	<b>Keg/Sub. Keg</b>	<b>72,76%</b>	
		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>897.193.000</b>	<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>346.094.900</b>	<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>38,58%</b>	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5.765.000	30	Orang/1.TA	5.765.000	30	Orang/1.TA	100%	
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	161.828.000	1.000	Org/12 Bulan	132.364.800	1.000	Org/12 Bulan	81,79%	

			<b>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</b>	729.600.000	1.000	Org/Tahun	207.965.100	1.000	Org/Tahun	28,50%		
			<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	758.400.000	2	Sub.Keg	758.400.000	2	Sub.Keg	100%		
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-	-	-	-	-		
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	758.400.000	80	org/12 Bulan	758.400.000	80	org/12 Bulan	100%		
			<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.764.186.032	4	Sub.Kegiatan	1.434.069.585	4	Sub.Kegiatan	81,29%		
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60.866.000	109	paskes dan gerakan	19.350.000	109	paskes dan gerakan	31,79%		
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	412.211.000	12	bln/gerakan	170.700.000	12	bln/gerakan	41,41%		
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.245.365.000	4	paket	1.207.539.000	4	paket	96,96%		
			<b>Belanja Modal</b>	1.245.365.000	4	paket	1.207.539.000	4	paket	96,96%		
			<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	1.245.365.000	4	paket	1.207.539.000	4	paket	96,96%		
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga	398.565.000			396.132.000					
			<i>Belanja Modal Mebel</i>	398.565.000	3	unit	396.132.000	3	unit	99,39%		
			<i>Belanja Modal Alat Kedokteran</i>	296.100.000			263.607.000					
			<i>Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan</i>	296.100.000	24	unit	263.607.000	24	unit	89,03%		
			<i>Belanja Modal Komputer Unit</i>	550.700.000			547.800.000					
			<i>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya</i>	550.700.000	10	unit	547.800.000	10	unit	99,47%		
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	45.744.032	30	akseptor/gerakan	36.480.585	30	akseptor/gerakan	79,75%		

			<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	308.720.064	2	Sub.Kegiatan	174.392.064	2	Sub.Kegiatan	56,49%			
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	278.720.000	12	Kampung/da n 10	149.392.000	5	Kampung/da n 5	53,60%			
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	30.000.064	13	Kampung da n 10	25.000.064	13	Kampung da n 10	83,33%			
			<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	296.000.000	1	da n 2	155.266.790	1	Keg. /Sub.Keg	52,45%			
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	296.000.000	30	da n 10	155.266.790	30	da n 10	52,45%			
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	72.000.000	30	da n 10	54.676.040	30	da n 10	75,94%			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.000.000	30	da n 10	100.590.750	30	da n 10	44,91%			
			Sosialisasi IPK				-						
			<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		-	-	-	-	-	-			
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-		-	-		-			

Adapun Realisasi Pelaksanaan Pagu Anggaran 2021, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun melaksanakan 4 (*empat*) Program terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan 37 (Tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1. Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	912.527.426	850.170.166	93,17%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.506.084	7.636.084	61,06%
1.a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.056.084	3.056.084	100%
1.b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.450.000	4.580.000	48,47%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.393.293	12.828.593	83,34%
2.a.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.670.000	3.330.000	58,73%
2.b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.723.293	9.498.593	97,69%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.786.489	102.355.288	84,74
3.a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.471	1.997.471	100%
3.b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.320.618	49.010.712	97,40%
3.c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.278.400	7.278.400	100%
3.d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.190.000	44.068.705	72,02%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.661.560	630.926.601	98,02%
4.a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.000.000	90,91%

4.b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.561.560	48.926.601	82,14%
4.c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.000.000	581.000.000	99,66%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.180.000	96.423.600	80,23%
5.a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.840.000	91.573.600	80,44%
5.b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.340.000	4.850.000	76,50%
<b>II.</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>79.615.418</b>	<b>52.450.880</b>	<b>65,88%</b>
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	45.000.792	43.413.622	96,47%
1.a.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.190	24.515.038	98,06%
1.b.	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0	0	
1.c.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.602	18.898.584	94,49%
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.614.626	9.037.258	26,11%
2.a.	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	22.517.258	9.037.258	40,13%
2.b.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	0	0	0
2.c.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	0	0
2.d.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12.097.368		0,00%
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>3.728.499.096</b>	<b>2.712.956.549</b>	<b>72,76%</b>
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	897.193.000	346.094.900	38,58%

1.a.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5.765.000	5.765.000	100%
1.b.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	161.828.000	132.364.800	81,79%
1.c.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	729.600.000	207.965.100	28,50%
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	758.400.000	758.400.000	100%
2.a.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-
2.b.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	758.400.000	758.400.000	100%
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.764.186.032	1.434.069.585	81,29%
3.a.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60.866.000	19.350.000	31,79%
3.b.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	412.211.000	170.700.000	41,41%
3.c.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.245.365.000	1.207.539.000	96,96%
3.d.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	45.744.032	36.480.585	79,75%
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	308.720.064	17.4392.064	56,49%
4.a.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	278.720.000	149.392.000	53,60%
4.b.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	30.000.064	25.000.064	83,33%
<b>IV</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>296.000.000</b>	<b>155.266.790</b>	<b>52,45%</b>
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	296.000.000	155.266.790	52,45%

	Keluarga			
1.a.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	72.000.000	54.676.040	75,94%
1.b.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.000.000	100.590.750	44,91%
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-
2.a.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-

Sumber : LPJ Fungsional Tahun Anggaran 2021

**Tabel 2.1.I. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	912.527.426	850.170.166	93,17%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.506.084	7.636.084	61,06%
1.a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.056.084	3.056.084	100%

1.b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.450.000	4.580.000	48,47%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.393.293	12.828.593	83,34%
2.a.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.670.000	3.330.000	58,73%
2.b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.723.293	9.498.593	97,69%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.786.489	102.355.288	84,74
3.a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.471	1.997.471	100%
3.b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.320.618	49.010.712	97,40%
3.c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.278.400	7.278.400	100%
3.d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.190.000	44.068.705	72,02%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.661.560	630.926.601	98,02%
4.a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.000.000	90,91%
4.b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.561.560	48.926.601	82,14%
4.c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.000.000	581.000.000	99,66%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.180.000	96.423.600	80,23%
5.a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.840.000	91.573.600	80,44%
5.b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.340.000	4.850.000	76,50%

### 3.2.I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 912.527.426.00,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 850.170.166.00,-** atau sebesar 93,17% dengan rincian kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.506.084,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 7.636.084,- atau sebesar 61,06%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%, dengan rincian Sub Kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.056.084,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 3.056.084,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 9.450.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 4.580.000,- atau sebesar 48,47%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 15.393.293,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 12.828.593,- atau sebesar 83,34%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian Sub Kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 5.670.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 3.330.000,- atau sebesar 58,73%, realisasi

- output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 9.723.293,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 9.498.593,- atau sebesar 97,69%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 120.786.489,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 102.355.288,- atau sebesar 84,74%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00 %. Dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 1.997.471,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 1.997.471,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00 %
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 50.320.618,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 49.010.712,- atau sebesar 97,40%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00 %
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 7.278.400,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 7.278.400,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00 %

- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 61.190.000,- dengan target Output/Volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 44.068.705,- atau sebesar 72,02%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00 %
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 643.661.560,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 630.926.601,- atau sebesar 98,02% realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 1.100.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 90,91% realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 59.561.560,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 48.926.601,- atau sebesar 82,14% realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 583.000.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 581.000.000,- atau sebesar 99,66%% realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 120.180.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 96.423.600,- atau sebesar 80,23%., realisasi output/volume sebanyak 1

(satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 113.840.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 91.573.600,- atau sebesar 80,44%., realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 6.340.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 4.850.000,- atau sebesar 76,50%., realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun untuk tahun anggaran 2021 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya. dimana perbandingan capaian realisasi tahun sebelumnya dengan rata – rata sebesar 97,53% mengalami penurunan sebesar 04,36%.

Tabel 2.1.II. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
II.	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>79.615.418</b>	<b>52.450.880</b>	<b>65,88%</b>
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45.000.792	43.413.622	96,47%

	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
1.a.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.190	24.515.038	98,06%
1.b.	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0	0	
1.c.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.602	18.898.584	94,49%
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.614.626	9.037.258	26,11%
2.a.	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	22.517.258	9.037.258	40,13%
2.b.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	0	0	0
2.c.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	0	0
2.d.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12.097.368		0,00%

### 3.2.2. Program Pengendalian Penduduk

Dengan jumlah dana sebesar Rp. **79.615.418,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. **52.450.880,00,-** atau sebesar **65,88%** dengan rincian kegiatan :

3. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sebesar Rp. 45.000.792,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar

Rp. 43.413.622,- atau sebesar 96,47%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%, dengan rincian sub kegiatan :

- a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 25.000.190,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 24.515.038,- atau sebesar 98,06%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100%
  - b. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga sebesar Rp. 25.000.190,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 24.515.038,- atau sebesar 98,06%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) sub kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100%
  - c. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK sebesar Rp. 20.000.602,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 18.898.584,- atau sebesar 94,49%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi Sub kegiatan/fisik sebesar 100%
4. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 34.614.626,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 9.037.258,- atau sebesar 26,11%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan sebesar Rp. 22.517.258,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 9.037.258,- atau sebesar 40,13%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi Sub kegiatan/fisik sebesar 100%

- b. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain sebesar Rp. 0,00,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,00%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi Sub kegiatan/fisik sebesar 0,00%
- c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebesar Rp. 0,00,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,00%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi Sub kegiatan/fisik sebesar 0,00%
- d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebesar Rp. 12.097.368,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,00%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi Sub kegiatan/fisik sebesar 0,00%

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana perbandingan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 99,82%, mengalami penurunan sebesar 33,94%.

**Tabel 2.1.III. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program  
Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana**

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
III	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.728.499.096	2.712.956.549	72,76%
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	897.193.000	346.094.900	38,58%
1.a.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5.765.000	5.765.000	100%
1.b.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	161.828.000	132.364.800	81,79%
1.c.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	729.600.000	207.965.100	28,50%
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	758.400.000	758.400.000	100%
2.a.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-
2.b.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	758.400.000	758.400.000	100%
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.764.186.032	1.434.069.585	81,29%
3.a.	Pengendalian Pendistribusian Alat	60.866.000	19.350.000	31,79%

	dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
3.b.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	412.211.000	170.700.000	41,41%
3.c.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.245.365.000	1.207.539.000	96,96%
3.d.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	45.744.032	36.480.585	79,75%
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	308.720.064	17.4392.064	56,49%
4.a.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	278.720.000	149.392.000	53,60%
4.b.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	30.000.064	25.000.064	83,33%

### 3.1.3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dengan jumlah dana sebesar **Rp. 3.728.499.096,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. **2.712.956.549,00,-** atau sebesar **72,76%** dengan rincian kegiatan :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebesar Rp. 897.193.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 346.094.900,- atau sebesar 38,58%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian sub kegiatan :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja sebesar Rp. 5.765.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 5.765.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
  - b.. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK sebesar Rp. 161.828.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 132.364.800,- atau sebesar 81,79%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
  - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK sebesar Rp. 729.600.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 207.965.100,- atau sebesar 28,50%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebesar Rp. 758.400.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 758.400.000,- atau sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian sub kegiatan :
    - a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB sebesar Rp. 0.00,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 0.00,- atau sebesar 0.00%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 0,00%
    - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PLKB sebesar Rp. 758.400.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 758.400.000,- atau

sebesar 100%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.764.186.032,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 1.434.069.585,- atau sebesar 81,29%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian sub kegiatan :
  - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebesar Rp. 60.866.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 19.350.000,- atau sebesar 31,79%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
  - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar Rp. 412.211.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 170.700.000,- atau sebesar 41,41%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
  - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sebesar Rp. 1.245.365.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 1.207.539.000,- atau sebesar 96,96%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
  - d. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak sebesar Rp. 45.744.032,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 36.480.585,- atau sebesar

79,75%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebesar Rp. 45.744.032,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 36.480.585,- atau sebesar 79,75%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%, dengan rincian sub kegiatan :
  - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB sebesar Rp. 278.720.000,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 149.392.000,- atau sebesar 53,60%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%
  - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB sebesar Rp. 30.000.064,- dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.064,- atau sebesar 83,33%, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana perbandingan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 81,46% mengalami penurunan sebesar 08,70%.

**Tabel 2.1.IV. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
IV	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	296.000.000	155.266.790	52,45%
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296.000.000	155.266.790	52,45%
1.a.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	72.000.000	54.676.040	75,94%
1.b.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.000.000	100.590.750	44,91%
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-
2.a.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	-	-	-

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
--	--------------------------------------	--	--	--

#### 2.1.IV. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 296.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 155.266.790,- atau sebesar 52,45% dengan rincian kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar **Rp. 72.000.000,-** dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar **Rp. 54.676.040,-** atau sebesar **75,94%**, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%.
  - a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) sebesar **Rp. 72.000.000,-** dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar **Rp. 54.676.040,-** atau sebesar **75,94%**, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) sub kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%.
  - b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar **Rp. 224.000.000,-** dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar **Rp. 100.590.750,-** atau sebesar **44,91%**, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) sub kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar 100,00%.

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar **Rp. 0.00,-** dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar **Rp. 0.00,-** atau sebesar **0.00%**, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) kegiatan serta realisasi kegiatan/fisik sebesar **0,00%**.
  - a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar **Rp. 0.00,-** dengan target output/volume sebanyak 1 (satu) Tahun Anggaran dan terealisasi sebesar **Rp. 0.00,-** atau sebesar **0.00%**, realisasi output/volume sebanyak 1 (satu) sub kegiatan serta realisasi sub kegiatan/fisik sebesar **0,00%**.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum tidak menemui permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana perbandingan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 47,55%.

## BAB IV

### PENUTUP

---

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pertama pada tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Tahun 2021.

Adapun capaian sasaran indikator Kinerja belum tercapai 100 % dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan menunjang capain

sasaran tidak dapat dilaksanakan akibat terjadinya Repocusing kegiatan dan anggaran yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang melanda sejak awal Tahun 2020 hingga saat ini.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun, ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sarolangun.

